

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara atau suatu daerah secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah juga dapat diartikan sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi suatu daerah merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi maka semakin cepat proses pertambahan output suatu wilayah sehingga prospek perkembangan suatu wilayah tersebut semakin baik.

Kenaikan tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tujuan penting bagi pemerintah pusat maupun daerah. Desentralisasi merupakan tujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah, mengurangi kesenjangan, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih efisien dan akurat terhadap kebutuhan, potensi maupun karakteristik yang terdapat pada masing-masing daerah. Selain sebagai tujuan pemerintah, pertumbuhan ekonomi juga merupakan indikator pencapaian pembangunan nasional.

Desentralisasi akan memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk membuat kebijakan-kebijakan dan rencana keuangan sendiri, sehingga akan memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Menurut UU No.32 tahun

2004, desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam sistem NKRI. Desentralisasi fiskal merupakan pelimpahan wewenang kepada daerah dalam mengelola sumber-sumber keuangan sendiri, sehingga daerah mempunyai kesempatan yang lebih untuk mengatur rumah tangganya. Keputusan menerapkan desentralisasi fiskal menuntut adanya peningkatan ekonomi di daerah karena prinsip dasar pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia adalah “ *money follows functions*” yaitu fungsi pokok pelayanan public di daerah, dengan adanya dukungan pembiayaan pusat melalui penyerahan sumber-sumber penerimaan kepada daerah (Zuwesty eka putri, 2015)

Dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan pemerintah daerah dalam bentuk pelaksanaan kewenangan fiskal, setiap daerah harus dapat menggali potensi dan mengidentifikasi sumber-sumber daya yang dimilikinya. Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi (UU No. 33 tahun 2004).

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu indikator yang menentukan derajat kemandirian suatu daerah. Semakin besar penerimaan Pendapatan Asli

Daerah (PAD) suatu daerah maka semakin rendah tingkat ketergantungan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah pusat. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Hal ini dikarenakan PAD mentukan kapasitas pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintah, yaitu melaksanakan pelayanan publik (*Public service fungtion*), dan melaksanakan pembangunan (*development fungtion*).

Dampak pada meningkatnya peranan pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsi pemerintahan disebabkan oleh adanya pergeseran dalam penggunaan dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah terutama fungsi alokasi. Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan khusus. Pemanfaatan DAK ditujukan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang. Dengan adanya pengalokasian DAK diharapkan dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, karena DAK cenderung akan menambah asset tetap yang dimiliki pemerintah daerah guna meningkatkan pelayanan public.

Upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi diantaranya melalui kebijakan pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang akan mendorong peningkatan permintaan produksi dalam perekonomian. Bentuk pengeluaran pemerintah berupa alokasi belanja modal untuk penyediaan berbagai sarana dan prasarana fasilitas publik yang dapat menjadi asset tetap daerah dan mempunyai nilai manfaat lebih satu tahun, diharapkan dapat menjadi modal

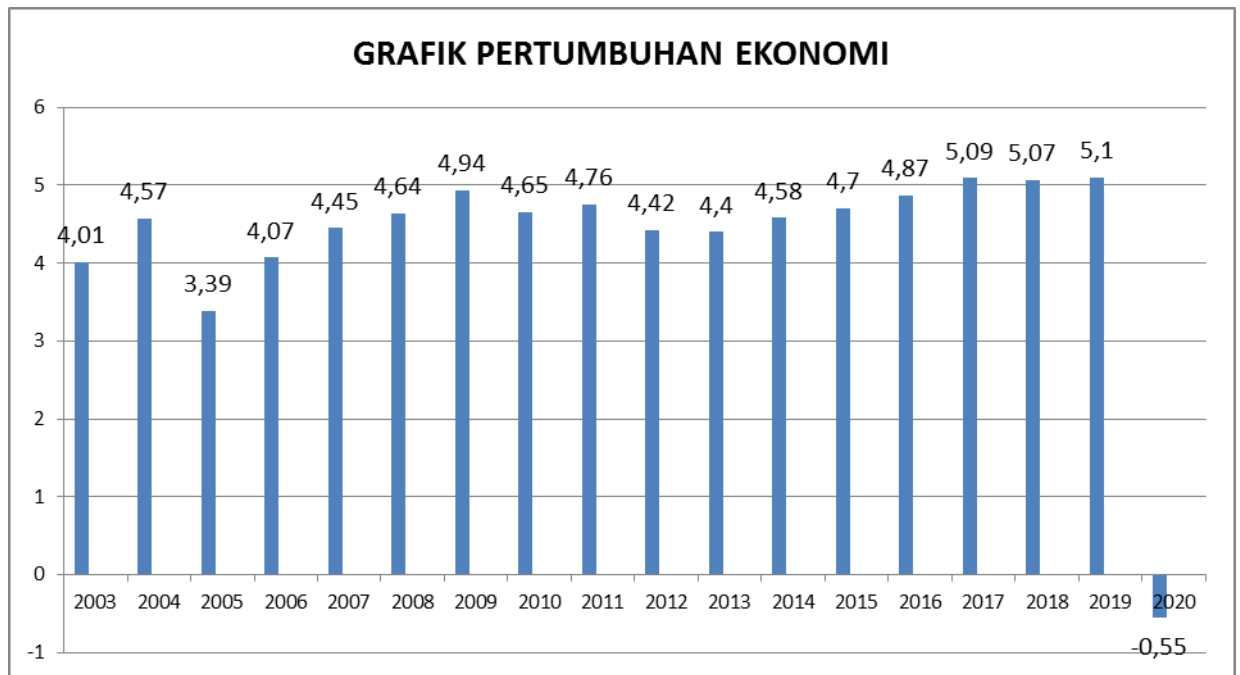
penunjang terlaksananya berbagai aktivitas ekonomi masyarakat. Selain itu permasalahan pengeluaran pemerintah khususnya belanja modal sampai saat ini belum mendapat perhatian yang serius dari pemerintah baik dipusat maupun di daerah sehingga kedepan hendaknya lebih intensif diperhatikan dan diprioritaskan, karena pada kenyataan selama ini anggaran pemerintah baik APBN maupun APBD lebih besar persentasenya untuk belanja pegawai dari pada belanja modal. Hal tersebut mengakibatkan pembangunan di daerah belum terlihat berdampak signifikan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan masih minimnya kualitas pelayanan publik.

Kabupaten Timor Tengah Utara merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai salah satu daerah yang perbatasan langsung dengan Negara Republik Demokrasi Timor Leste. Kondisi daerah yang berada dilintasi batas ini memiliki potensi ekonomi yang cukup besar dalam mendorong perekonomian wilayahnya sendiri karena berada pada jalur perdagangan antar dua buah negara. Akan tetapi fakta dari berbagai indikator makro ekonomi menunjukkan bahwa selama tahun 2004-2018 dengan melihat data PDRB pertumbuhan ekonomi yang terus mengalami fluktuatif atau naik turunnya pertumbuhan ekonomi.

Selain itu Kabupaten Timor Tengah Utara merupakan salah satu kabupaten di Nusa Tenggara Timur sebagai daerah otonomi, pelaksanaan pembangunan diselenggarakan dengan mengandalkan kemampuan keuangan daerah yang berasal dari pemanfaatan potensi daerah sendiri, pemerintah pusat serta lain-lain pendapatan yang sah.

Sumber keuangan daerah Kabupaten Timor Tengah Utara berasal dari Pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan dari pemerintahan pusat, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Keuangan daerah ini digunakan untuk menyediakan berbagai macam fasilitas public dalam mendukung perekonomian daerah kabupaten TTU. Pertumbuhan ekonomi kabupaten TTU selalu mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Untuk mendetail dapat dilihat pada tabel berikut ini :

GRAFIK 1.1
Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2003-2020



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten. TTU Tahun 2003-2020

Berdasarkan grafik diatas dapat dijelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi kabupaten Timor Tengah Utara selama periode tahun 2003-2020 selalu mengalami fluktuasi setiap tahunnya, dimana pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada tahun 2017 yakni sebesar 5,09 persen sementara pertumbuhan

ekonomi terendah terjadi pada tahun 2005 yakni sebesar 3,39 persen. Hal ini menggambarkan bahwa pengeluaran pemerintah untuk pelayanan publik dalam hal penyediaan sarana dan prasarana serta infranstruktur lain sebagai menunjang perekonomian belum maksimal dan efisien sehingga diperlukan perhatian yang serius serta memperbaiki sistim pengelolaan keuangan dan perlu mengali potensi daerah yang belum tersentuh untuk meningkatkan pendapatan daerah dan pada akhirnya bisa digunakan untuk meningkatkan pelayanan publik di kabupaten Timor Tengah Utara.

GRAFIK 1.2

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten TTU tahun 2003-2020

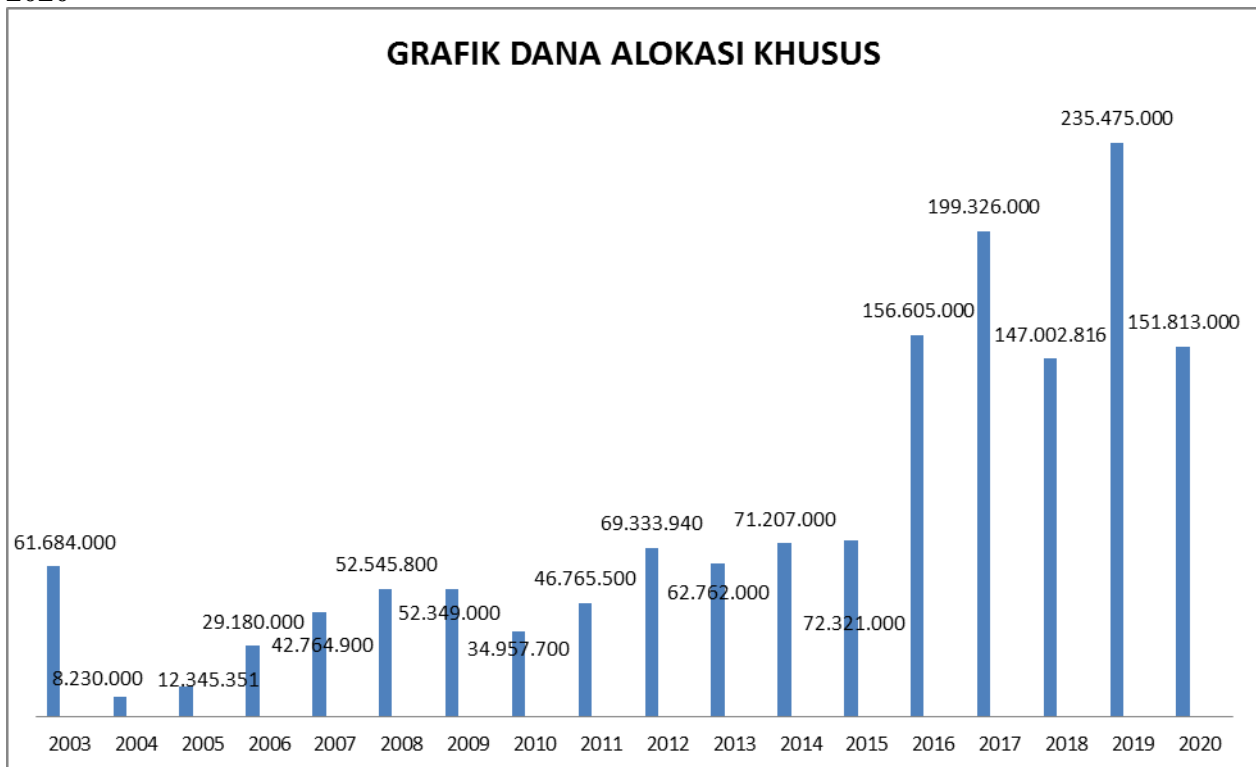


Sumber : BPS Kabupaten. TTU tahun 2003-2020

Berdasarkan grafik 1.2 diatas terlihat bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kabupaten Timor Tengah Utara mengalami fluktuasi. dimana PAD tertinggi terjadi pada tahun 2017 yakni sebesar Rp.78.015.287 dan PAD terendah terjadi pada tahun 2005 yakni sebesar Rp. 5.498.253 untuk lebih mendetail dapat dilihat pada tabel di atas. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih sangat minimnya penggalian potensi sumber pendapatan daerah yang berasal dari pajak dan retribusi serta belum mengembangkan potensi daerah secara maksimal dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah kabupaten TTU. Dengan demikian maka hal ini juga menyebabkan pembangunan di kabupaten Timor Tengah Utara belum begitu maksimal dan merata sehingga akan berpengaruh terhadap tumbuan ekonomi daerah. apabila pemerintah daerah mengali secara maksimal potensi yang dimiliki maka akan memberikan dampak begitu besar terhadap Pendapatan Asli Daerah sehingga bisa digunakan untuk melakukan penyediaan sarana dan prasarana yang lebih memadai guna untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.

Salah satu sumber keuangan daerah kabupaten TTU selain dari Pendapatan Asli Dearah yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK) yang ditransfer dari pemerintah pusat untuk pembangunan di daerah kabupaten TTU. Dana Alokasi Khusus di kabupaten TTU setiap tahun mengalami fluktuasi, dimana DAK terbesar yang ditransfer oleh pusat terjadi pada tahun 2017 yakni sebesar Rp.199,326,000 dan jumlah DAK terkecil terjadi pada tahun 2004 yakni sebesar Rp. 8,230,000. Untuk lebih mendetail dapat dilihat pada tabel berikut ini :

GRAFIK 1.3
Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2003-2020

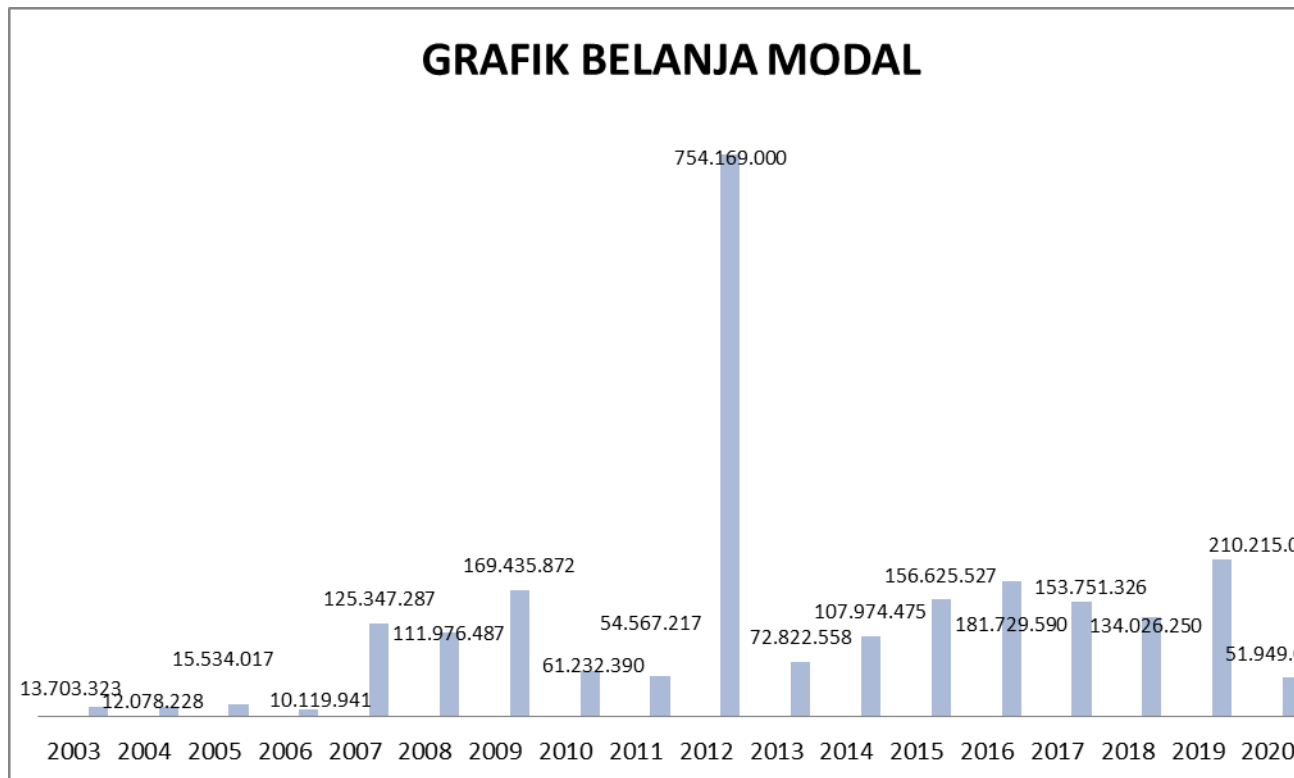


Sumber : BPS Kabupaten. TTU tahun 2003-2020

Dana Alokasi Khusus (DAK) pada grafik 1.3 diatas menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus di kabupaten TTU setiap tahun mengalami fluktuasi, dimana DAK terbesar yang ditransfer oleh pusat terjadi pada tahun 2017 yakni sebesar Rp.199,326,000 dan jumlah DAK terkecil terjadi pada tahun 2004 yakni sebesar Rp. 8,230,000. Untuk lebih mendetail dapat dilihat pada tabel di atas :

Salah satu sumber keuangan daerah kabupaten TTU selain dari Pendapatan Asli Dearah yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK) yang ditransfer dari pemerintah pusat untuk pembangunan di daerah kabupaten TTU.

setiap tahun kabupaten Timor Tengah Utara mendapatkan saluran dana yang cukup besar dan cenderung meningkat setiap tahunnya. Akan tetapi pembangunan ekonomi khususnya penyediaan sarana dan prasarana penunjang ekonomi belum dirasakan oleh masyarakat. Faktanya di kabupaten Timor Tengah Utara sampai saat ini masih terdapat banyak daerah yang belum diperhatikan mengenai infrastruktur jalan, air bersih, jembatan, listrik serta fasilitas kesehatan dan pendidikan juga belum memadai. Dengan adanya bantuan dana yang cukup besar ini diharapkan dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan public kepada masyarakat diberbagai bidang ekonomi sehingga bisa mempercepat perekonomian daerah. hal ini dikarenakan Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional sehingga perlu di gunakan dengan sebaik-baiknya untuk kebutuhan masyarakat yang pada akhirnya adalah menciptakan kesejahteraan.



grafik 1.4 diatas menunjukkan bahwa belanja modal di kabupaten TTU mengalami fluktuasi setiap tahunnya dimana belanja modal terbesar terjadi pada tahun 2012 yakni sebesar Rp.754,169,042 dan belanja modal terkecil terjadi pada tahun 2005 yakni sebesar Rp.5,534,017. Untuk lebih mendetail tentang belanja modal dapat dilihat pada tabel di atas :

. Kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah dalam melakukan pembangunan daerah belum maksimal dan terarah pada kesejahteraan masyarakat. Pada kenyataannya bahwa anggaran modal yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara kebanyakan bukan untuk belanja modal pembangunan melainkan untuk belanja operasional dan belanja pegawai sehingga hal ini akan berdampak pada kondisi perekonomian kedepannya sangat menurun. Belanja modal dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap pemerintah daerah,

yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya guna untuk meningkatkan perekonomian daerah.

Secara teoritis ada tiga cara untuk memperoleh aset tetap tersebut, yakni dengan membangun sendiri, menukarkan dengan aset tetap lainnya, atau juga dengan membeli. Namun, untuk kasus di pemerintahan, biasanya cara yang dilakukan adalah membangun sendiri atau membeli. Dengan peningkatan aset-aset daerah antara lain infrastruktur dan sarana prasarana, pembangunan daerah untuk memperbaiki atau memperlancarkan kinerja pemerintah daerah yang terdapat di kabupaten Timor Tengah Utara, khususnya belanja modal yang diharapkan dapat mendorong peningkatan ekonomi masyarakat yang pada gilirannya dapat memacu pertumbuhan ekonomi. Meningkatnya belanja modal menjadi faktor pendorong timbulnya berbagai investasi baru di daerah dalam mengoptimalkan dan pemanfaatan berbagai macam sumber daya sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah

Belanja modal dapat menyediakan berbagai sarana dan prasarana fasilitas publik yang dapat menjadi aset tetap daerah dan mempunyai nilai manfaat lebih dari satu tahun yang diharapkan dapat menjadi modal penunjang terlaksananya berbagai aktifitas ekonomi masyarakat. Permasalahan belanja modal yang ada di daerah tersebut khususnya aset-aset daerah, infrastruktur daerah dan sarana prasarana daerah yang sampai saat ini masih mengalami fluktuatif atau naik turunnya aset-aset pemerintah daerah, sehingga perhatian serius dari pemerintah baik di pusat maupun di daerah mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi yang terdapat di daerah tersebut sangat dibutuhkan .

Dengan demikian berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Analisis Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten TTU dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Moderasi**”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas maka dapat dikemukakan masalah yang ingin disampaikan adalah :

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah (X1) berpengaruh terhadap Belanja Modal (X3) di kabupaten Timor Tengah Utara
2. Apakah Dana Alokasi Khusus (X2) berpengaruh terhadap Belanja Modal (X3) di kabupaten Timor Tengah Utara
3. Apakah Pendapatan Asli Daerah (X1) berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y) di kabupaten Timor Tengah Utara
4. Apakah Dana Alokasi Khusus (X2) berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y) di kabupaten Timor Tengah Utara
5. Apakah Belanja Modal (X3)) berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y) di kabupaten Timor Tengah Utara
6. Apakah Belanja Modal (X3) mampu memediasi pengaruh Pendapatan Asli Daerah (X1) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y) di kabupaten Timor Tengah Utara
7. Apakah Belanja Modal (X3) mampu memediasi pengaruh Dana Alokasi Khusus(X2) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y) di kabupaten Timor Tengah Utara

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari pada penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (X1) terhadap Belanja Modal (X3) di kabupaten Timor Tengah Utara
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Dana Alokasi Khusus (X2) terhadap Belanja Modal (X3) di kabupaten Timor Tengah Utara
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (X1) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y) di kabupaten Timor Tengah Utara
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Dana Alokasi Khusus (X2) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y) di kabupaten Timor Tengah Utara
5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Belanja Modal (X3) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y) di kabupaten Timor Tengah Utara
6. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (X1) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y) di kabupaten Timor Tengah Utara melalui Belanja Modal (X3) sebagai variabel mediasi
7. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Dana Alokasi Khusus (X2) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y) di kabupaten Timor Tengah Utara melalui Belanja Modal (X3) sebagai variabel mediasi

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan bermanfaat yaitu sebagai berikut :

1. Memberikan sumbangan pemikiran dan gambaran bagi pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi
2. Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi serta bisa menjadi bahan kajian lebih lanjut.

1.4.2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini bermanfaat sebagai berikut :

1. Sebagai masukan bagi pemerintah khususnya instansi terkait mengenai keuangan daerah serta menggunakan keuangan daerah untuk kegiatan yang produktif guna untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah
2. Untuk menambah wawasan penulis tentang perkembangan perekonomian kabupaten Timor Tengah Utara